

Sirajuddin : Jurnal Penelitian dan Kajian Pendidikan Islam
Vol. 03 No. 02 (2024)

Available online at <https://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/sirajuddin>

PENDIDIKAN ISLAM MULTIKULTURAL, KERANGKA KONSEPTUAL, PERKEMBANGAN DAN DINAMIKA FENOMENA DAN TENDENSI MULTIKULTURAL

Zainuddin

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang
zazaadiva@gmail.com

Hairul Ulum

Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang
email: ulumgrobogan127@gmail.com

DOI :

Received: Mei 2024

Accepted: Juni 2024

Published: Juni 2024

Abstrac

Based on the facts, increasing moral decadence and disgraceful behavior such as violence, brawls, exclusivism and weak tolerance and respect for other people in all its forms involving school children are real indicators of the ineffectiveness of the model and function of Islamic education that has been implemented so far. Therefore, how to build an intelligent and moral Indonesia? How can Multicultural Islamic Education change the face of Indonesia to become a country that is very tolerant? This type of research is qualitative research using the literature study method. The concepts and practices of multicultural education in the United States can be applied in Indonesia to support education that prioritizes democratic methods. Multicultural education in the United States is closely related to diversity issues, so the possibility of implementing it in Indonesia is a challenge. The fact is that the legacy of the Suharto regime regarding the prohibition on discussing SARA (ethnicity, religion, race and between groups) still continues today. However, understanding the diversity and differences of students, in relation to other groups, is very necessary in the context of multicultural education, especially to reduce prejudice and discrimination.

Kata Kunci: *Pendidikan, Multikultural dan Tendensi*

Pendahuluan

Salah satu wacana yang merebut ruang-ruang perjumpaan gagasan di Indonesia setidaknya sejak runtuhnya rezim politik Orde Baru pada 1998 adalah ide tentang pluralisme dan multikulturalisme. Secara simplistik, multikulturalisme dapat dipandang sebagai pengakuan atas pluralisme budaya. Pluralisme budaya bukanlah suatu yang “given” tetapi merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai di dalam suatu komunitas. Tidak mengherankan apabila tokoh politik dan pendidikan demokrasi, John Dewey, telah melahirkan karya monumentalnya yang mengandaikan relasi antara demokrasi dan pendidikan.¹

Meskipun telah dirintis berbagai langkah reformasi dan model pengembangan pendidikan Islam, tetapi ikhtiar tersebut hingga kini belum sepenuhnya mencapai tujuan sebagaimana diharapkan. Pada ranah empiris, implementasi pendidikan Islam di berbagai unit pendidikan belum banyak memberikan implikasi signifikan terhadap perubahan perilaku peserta didik, padahal salah satu tujuan utama pendidikan Islam menurut Ali Ashraf adalah terjadinya perubahan baik pola pikir (*way of thinking*), perasaan dan kepekaan (*way of feeling*), maupun pandangan hidup (*way of life*) pada peserta didik.

Berdasarkan fakta meningkatnya dekadensi moral dan perilaku tidak terpuji seperti kekerasan, tawuran, eksklusivisme dan lemahnya toleransi serta penghargaan terhadap orang lain dalam segala bentuknya yang melibatkan anak sekolah merupakan indikator nyata dari belum efektifnya model dan fungsi pendidikan Islam yang selama ini dijalankan.

Oleh karena itu, dari berbagai fenomena yang memprihatinkan di atas, kemudian banyak pihak memandang perlu dikembangkannya model pendidikan Islam multikultural yakni sebuah model pengembangan yang terfokus pada pentingnya penghormatan terhadap keragaman dan pengakuan kesederajatan paedagogis terhadap semua orang (*equal for all*) yang memiliki hak sama dalam memperoleh layanan pendidikan, serta penghapusan berbagai bentuk diskriminasi demi membangun kehidupan masyarakat yang adil sehingga terwujud suasana toleran, demokratis, humanis, inklusif, tentram dan sinergis tanpa melihat latar belakang kehidupannya, apapun etnik, status sosial, agama dan jenis kelaminnya.²

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Peneliti melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan topik permasalahan serta mengambil rujukan dari materi-materi yang sifatnya ilmiah. Sumber yang dikumpulkan oleh peneliti diperoleh melalui online artikel, jurnal serta buku-buku yang sesuai dengan topik permasalahan. Teknik analisa data yang digunakan yaitu teknik analisa isi dengan tujuan untuk mendapatkan simpulan yang valid. Pada teknik ini peneliti melakukan proses pemilihan, membandingkan,

¹ H.A.R Tilaar. *Kekuatan dan Pendidikan*. (Jakarta: Grasindo. 2004) Hlm. 1790

² Zakiyuddin Baidhaw, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural* (Jogjakarta: Rihlah Group, 2012), hlm. 45

menggabungkan, mamilah berbagai hasil temuan sehingga diperoleh kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

1. Pendidikan Multikultural

Sebelum penulis menguraikan Pendidikan Multikultural sedikit akan menjelaskan dari asal muasal Multikultural. Pada mulanya peneyeberaluasan wacana multikultural melalui kegiatan *affirmative action* yang diarahkan untuk menolak anti rasisme dan driskiminasi kemudian dilanjutkan dengan cara menyebarkan konsep multikulturalisme dalam pengajaran dan pendidikan di sekolah-sekolah.wacana multikultural telah menemukan momentumnya sejak dasawarsa 1970-an setelah sebelumnya di AS dikembangkan “pendidikan interkultural”, berhadapan dengan meningkatnya “negara-negara tersebut . keseriusan pemerintah AS Misalnya, terhadap kajian multikultural disambut dengan hangat kalangan masyarakat intelektual , tercermin dari *melting pot*³ dan teori *salad bowl*”⁴ yang sempat dikembangkan walaupun keduanya pada akhirnya mengalami kegagalan.⁵

2. Hakikat Pendidikan Multikultural

James Banks dapat dipandang sebagai perintis pendidikan multikultural. Jadi penekanan dan perhatian Banks difokuskan pada pendidikannya. Banks yakin bahwa sebagian dari pendidikan lebih mengarah pada mengajari bagaimana berpikir daripada apa yang dipikirkan. Ia mengandaikan bahwa peserta didik harus diajari memahami semua jenis pengetahuan, aktif mendiskusikan konstruksi pengetahuan (*knowledge construction*) dan interpretasi yang berbeda-beda. Di titik ini, peserta didik harus dibiasakan menerima perbedaan.

Selanjutnya Banks berpendapat bahwa pendidikan multikultural merupakan suatu rangkaian kepercayaan (*set of beliefs*) dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis di dalam bentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun negara. Ia mendefinisikan pendidikan multikultural adalah ide, gerakan, pembaharuan pendidikan dan proses pendidikan yang tujuan utamanya adalah untuk mengubah struktur lembaga pendidikan supaya peserta didik baik pria maupun wanita, peserta didik berkebutuhan khusus, dan peserta didik yang merupakan anggota dari kelompok ras, etnis, dan kultur yang bermacam-macam itu akan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi akademis di sekolah.⁶

Sementara itu, ada yang berpendapat bahwa pendidikan multukultural memberi kompetensi multikultural. Pada masa awal kehidupan peserta didik, waktu banyak dilalui di daerah etnis dan kulturenya masing-masing. Kesalahan dalam mentransformasi nilai, aspirasi, etiket dari budaya tertentu, sering berdampak pada primordialisme kesukuan, agama, dan golongan yang berlebihan. Faktor ini penyebab timbulnya

³ Semacam peleburan berbagai budaya menjadi satu bentuk dalam pot (*from heterogeneous to homogeneous*)

⁴Tanpa ada peleburan pada masing-masing budaya karena adanya penghargaan untuk masing-masing individu untuk tetap eksis .

⁵ Sulalah. *Pendidikan Multikultural dialektiaka Nilai-nilai Universitas Kebangsaan*. (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2011) hlm. 23-24

⁶ Banks, James A. *An Introduction to Multicultural Education*. (Boston: Allyn andBacon. 2001) hlm. 245

permusuhan antar etnis dan golongan. Melalui pendidikan multikultural sejak dini diharapkan anak mampu menerima dan memahami perbedaan budaya yang berdampak pada perbedaan usage (cara individu bertingkah laku); folkways (kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat), mores (tata kelakuan di masyarakat), dan customs (adat istiadat suatu komunitas).

Dengan pendidikan multikultural peserta didik mampu menerima perbedaan, kritik, dan memiliki rasa empati, toleransi pada sesama tanpa memandang golongan, status, gender, dan kemampuan akademik.⁷ Hal tersebut ditekankan pula oleh Musa Asya⁸rie yang mengandaikan pendidikan multikultural bermakna sebagai proses pendidikan: cara hidup menghormati, tulus, toleransi terhadap keragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural, sehingga peserta didik kelak memiliki kekenyalan dan kelenturan mental bangsa dalam menyikapi konflik sosial di masyarakat.⁸

3. Tujuan Pendidikan Multikultural

Banyaknya negara yang menyelenggarakan pendidikan multikultural memberikan suatu pemahaman bahwa, keinginan menyelenggarakan pendidikan multikultural muncul dalam masyarakat majmuk yang menyadari kemajmukannya. Masyarakat seperti ini menyadari dirinya terdiri dari berbagai golongan yang berbeda secara etnis, sosial-ekonomis, dan kultur. Ironisnya, di Indonesia wacana multikultural belum secara serius mendapatkan tempat sebagai suatu kajian penting.⁹

Sedikitnya dalam pengakuan Parekh, multikulturalisme meliputi tiga hal. *Pertama*, multikulturalisme berkenaan dengan budaya; *kedua*, merujuk pada keragaman yang ada; dan *ketiga*, berkenaan dengan tindakan spesifik pada respon terhadap keragaman tersebut. Akhiran “isme” menandakan suatu doktrin normatif yang diharapkan bekerja pada setiap orang dalam konteks masyarakat dengan beragam budaya. Proses dan cara bagaimana multikulturalisme sebagai doktrin normatif menjadi ada dan implementasi gagasan-gagasan multikultural yang telah dilakukan melalui kebijakan-kebijakan politis, dalam hal ini kebijakan-kebijakan pendidikan.¹⁰

Satu hal yang mendasar, perbedaan-perbedaan pada diri peserta didik yang harus diakui dalam pendidikan multikultural, antara lain mencakup penduduk minoritas etnis dan ras, kelompok pemeluk agama, perbedaan agama, perbedaan jenis kelamin, kondisi ekonomi, daerah/asal-usul, ketidakmampuan fisik dan mental, kelompok umur, dan lain-lain.¹¹ Melalui pendidikan multikultural ini peserta didik diberi kesempatan dan pilihan untuk mendukung dan memperhatikan satu atau beberapa budaya, misalnya sistem nilai, gaya hidup, atau bahasa. Pendidikan multikultural paling tidak menyangkut tiga hal, yaitu: (a) ide dan kesadaran akan nilai penting keragaman budaya, (b) gerakan pembaharuan pendidikan, dan (c) proses.

⁷ Farida Hanum. . *Fenomena Pendidikan Multikural pada Mahapeserta didik Aktivis UNY*. Laporan Penelitian. 2005 Lemlit UNY.

⁸ Musa Asya⁸rie.. “*Pendidikan Multikutlural dan Konflik 1-2*”. 2004. www.kompas.co.id.

⁹ Sulalah. *Pendidikan Multikultural dialektiaka Nilai-nilai Universitas Kebangsaan*. (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2011) hlm. 41

¹⁰ Bhikhu Parekh, *Rethinking Multikulturalism keberagaman Budaya dan Teori Politik*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008) hlm. 299

¹¹ Baker G.C. 1994. *Planning dan Organizing for Multicultural Instruction*. (2nd). (California: Addison-Elsej Publishing Company. 1994) hlm. 11

4. Perkembangan Pendidikan Multikultural di Beberapa Negara¹²

Kajian terhadap konsep multikultural memang perlu dikaitkan dengan asal usul konsep multikultural agar diketahui latar belakang sosiologis pengembangan konsep multikultural dan relevansinya dengan kondisi yang berkembang di Indonesia. Beberapa kajian terhadap multikultural, misalnya yang dilakukan oleh Melani Budianta (2004), Hilda Hernandez (2001), Will Kymlicka (2003), Donna M. Gollnick dan Philip C. Chinn (2002), H.A. R. Tilaar (2004), dan Alo Liweri (2005), yang menyatakan bahwa negara-negara Barat seperti Amerika, Kanada, Australia, Jerman, dan Inggris, sering disebut sebagai asal mula konsep multikultural. Di negara-negara tersebut, konsep multikultural tidak lagi sebagai wacana akademik, melainkan telah menjadi bagian strategis kebijakan publik seperti yang berbentuk affirmative action, yaitu suatu program pemberdayaan terhadap kelompok tertentu yang dikategorikan sebagai minoritas. Di negara-negara tersebut, multikultural juga dijadikan sebagai kerangka acuan dalam merancang suatu program pendidikan yang mengakomodasi keragaman masyarakat.

Ada dua pertimbangan utama yang melatarbelakangi penggunaan multikultural sebagai acuan dalam merancang kebijakan publik di negara-negara tersebut.

Pertama, keragaman masyarakat. Negara-negara yang telah disebutkan di atas, dihuni oleh penduduk yang memiliki latar belakang sosial-budaya yang beragam. *Kedua*, terjadinya segregasi sebagai kelanjutan dari keragaman. Dalam konteks ini, Amerika dapat dijadikan contoh. Sebelum mengalami perubahan sebagai masyarakat yang didasarkan pada prinsip multikultural, Parsudi Suparlan mengemukakan bahwa Amerika merupakan masyarakat rasis yang menghasilkan hierarki sosial dengan berbagai bentuk diskriminasi atas dasar ras dan asal suku bangsa.¹³ Dari pelbagai ras dan sukubangsa di Amerika, golongan WASP (White Anglo Saxon Protestant), menempati posisi mayoritas dan dominan. Sedangkan di pihak lain, mereka yang berkulit hitam merupakan kelompok minoritas, dan seringkali mendapat perlakuan yang diskriminatif.

5. Pendidikan Multikultural di Indonesia

Seperti diungkapkan sebelumnya jika SARA sejatinya adalah “ibu kandung” dan sebagai unsur utama yang mempersatukan bangsa ini dan bukan dijadikan alasan terjadinya konflik. Dalam studi sosial, ajakan agar selalu hidup berdampingan secara damai, merupakan bentuk sosialisasi nilai yang terkandung dalam multikulturalisme.

Kesadaran akan pentingnya kepelbagaian mulai muncul seiring gagalnya upaya

¹² Dalam sambutannya, mantan PM Goh Chok Tong mengungkapkan, banyak hal tentang kehidupan kaum Muslim Singapura di tengah masyarakat multikultural; negara kota ini berpenduduk mayoritas keturunan Cina (75 persen), Melayu Muslim (14 persen), India dan lain-lain (11 persen). Dengan komposisi seperti itu, kehidupan multikultural Singapura membuat terjadinya berbagai macam ‘penyesuaian’, khususnya dalam kehidupan keagamaan. Misalnya, suara azan tidak lagi dipancarkan keluar masjid, karena dapat menimbulkan kebisingan ke dalam apartemen yang kian banyak. Penyesuaian juga berlaku bagi para penganut agama lain dalam penyelenggaraan ritual yang menyentuh ranah publik dan karena itu dapat menimbulkan gangguan tertentu. Artikel Oleh Azyumardi Azra Tulisan ini pernah dimuat di *Republika*, 22 Juli 2010

¹³ Suparlan, 2003. “*Bhinneka Tunggal Ika: Keanekaragaman Sukubangsa atau Kebudayaan?*” *Antropologi Indonesia, Tahun XXVII, No. 72, September-Desember 2003*) hlm. 24

nasionalisme negara, yang dikritik karena dianggap terlalu menekan kesatuan daripada keanekaan yang acap kali terabaikan.

Kymlicka & He mengatakan bahwa ada beberapa kesulitan dalam mengaplikasikan model-model Barat tentang multikulturalisme dalam konteks Asia. Di samping kenyataan bahwa sejarah kolonialisasi berbeda, mereka berpendapat bahwa pemikiran Barat tentang multikulturalisme berkaitan dengan hak-hak kelompok minoritas sebagai masyarakat yang merasa tertindas oleh kelompok mayoritas. Bowen mendukung pemikiran Kymlicka & He ini dengan menganalisis situasi di Aceh, Sumatra Utara. Menurut Bowen, penduduk asli Aceh menjadi kelompok minoritas dikarenakan ekspansi orang Jawa yang sekarang menjadi penduduk mayoritas di Aceh. Selain itu, program transmigrasi merupakan salah satu yang menyebabkan adanya ekspansi. Namun demikian, saya percaya bahwa Bowen ini telah salah menginterpretasikan situasi di Aceh. Jika fenomena Aceh adalah benar, maka situasi ini akan berlaku untuk beberapa daerah di Indonesia.¹⁴

Hal yang penting dicatat adalah secara alamiah suku-suku di Indonesia terdapat perbedaan jumlah penduduk yang sangat mencolok. Misalnya, di daerah pedalaman Sumatra dan Kalimantan terdapat suku-suku dengan jumlah hanya ratusan orang saja, sedangkan suku Sunda yang mendiami provinsi Jawa Barat terdapat puluhan juta orang. Oleh karena itu, orang Indonesia hampir tidak pernah mempermasalahkan kesamaan hak antara kelompok yang minoritas dan mayoritas seperti halnya di Amerika Serikat. Permasalahan yang muncul di Indonesia adalah berkaitan dengan pembangunan suatu bangsa. Berdasarkan sejarahnya Sukarno dan Suharto sebagai presiden Indonesia adalah orang Jawa dan menjadikan Jawa sebagai pusat pembangunan suatu bangsa. Suku-suku di luar Jawa tidak begitu dilibatkan perannya, namun pemerintah pusat telah mengeksploitasi sumber-sumber ekonomi dan alam mereka, seperti lahan minyak di Aceh, sedangkan orang Aceh sendiri tidak mendapatkan keuntungan. Dengan kata lain, masalah sosial di Indonesia berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan politik, ekonomi, bahkan agama, dan bukan kelompok minoritas.

Tidak mudah memang mengaplikasikan konsep-konsep pendidikan multikultural dari Amerika Serikat ke Indonesia, karena latar belakang sejarah, sosial, politik, dan budaya yang sangat berbeda. Namun demikian, ada tujuan yang sama antarkedua negara tersebut dan mungkin negara-negara lain juga, yaitu untuk menciptakan masyarakat adil dan demokratis dalam kemajemukannya. Tujuan utama pendidikan multikultural di Amerika Serikat adalah untuk merealisasikan nilai demokrasi yang ditandai oleh kesamaan hak dan keadilan sosial dalam mendidik beragam siswa. Berdasarkan tujuan inilah dan tujuan yang berorientasi pada pendidikan untuk semua, pendidikan multikultural dapat diaplikasikan di Indonesia. Sekarang ini, pemerintah Indonesia sedang menuju masyarakat yang lebih demokratis dan adil sehingga pendidikan multikultural menjadi penting.

Konsep cultural pluralism yang mendukung pendidikan multikultural di Amerika Serikat dapat diaplikasikan untuk konteks Indonesia. Konsep ini mengukuhkan keberadaan dan kelangsungan etnik atau suku dan upaya saling memahami dan menghargai keberagamannya. Kredo yang mendorong konsep cultural pluralism di Amerika Serikat

¹⁴ Kymlicka, W. & He, B. (Eds.). 2005. *Multiculturalism in Asia*. New York: Oxford University Press: 2005)

adalah *E Pluri-bus Unum* (*Out of Many, One*). Kredo tersebut identik dengan Bhineka Tunggal Ika di Indonesia, meskipun berbeda-beda tetapi satu tujuan menuju masyarakat adil dan demokratis. Dalam *Dictionary of Multicultural Education*, “*cultural pluralism implies cultural diversity, equality among groups, and a commitment to the value of diversity in society*”. Jika kita berbicara tentang diversity, maka kemajemukan tidak hanya dialamatkan kepada keberagaman suku-suku saja, melainkan mengakomodasi isu SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan), gender, kelas sosial, bahasa, kelainan atau kekecualian, dan umur. Sayangnya secara politik, SARA telah menjadi isu sensitif di Indonesia.¹⁵

Buchori mengemukakan pendapatnya tentang “pendidikan pluralisme dan pendewasaan ber-bangsa” dalam sebuah seminar yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Budaya dan Perubahan Sosial, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Buchori mengatakan:¹⁶

“Pendidikan pluralisme menurut saya ialah pendidikan untuk mencapai kemampuan hidup berdasarkan keharusan-keharusan yang lahir dari kenyataan pluralisme yang ada dalam suatu masyarakat. Pendewasaan ber-bangsa menurut pemahaman saya ialah proses menuju ke suatu kehidupan yang dewasa sebagai suatu bangsa.”

Pendidikan pluralisme yang dikemukakan Buchori tampaknya berasal dari konsep *cultural pluralism* yang mendasari konsep pendidikan multikultural di Amerika Serikat. Buchori menjelaskan bahwa dalam setiap masyarakat pluralistik selalu terdapat sejumlah prasangka. Ma’arif merasa prihatin atas meningkatnya prasangka terhadap agama-agama sehingga konflik terus berkepanjangan. Salah satu contoh prasangka sebagaimana dikemukakan oleh Farhadian adalah “*Muslims suspected Christians of Christianization, while the Christians accused Muslims of attempting to create an Islamic State*”. Prasangka antara orang yang beragama Islam dengan orang yang beragama Kristen ini selalu muncul di Indonesia, tidak hanya antarkelompok di dalam negeri melainkan dengan kelompok lain di luar negeri.¹⁷

Para pakar seni di Indonesia menawarkan pendidikan multikultural dengan cara mempelajari keayaan beragam seni karena seni merupakan bagian dari suatu budaya atau etnik tertentu. Ma’arif menawarkan isi pendidikan agama untuk mempelajari perbandingan agama-agama sehingga pelajaran agama tidak terpisah-pisah menurut penganut agama-nya masing-masing saja. Memahami pendapat Buchori, saya beranggapan bahwa mempelajari beragam seni atau beragam agama belum bisa menjamin seseorang memiliki sikap dan perilaku yang menghargai keberagaman dan keberbedaan orang atau kelompok tertentu, tanpa dia menghilangkan prasangka terhadap seni, budaya, agama, dan orang pemilik dan penganutnya. Dengan kata lain, menghargai perbedaan dan keberagaman serta menghindari prasangka-prasangka merupakan salah satu esensi pendidikan multikultural di Indonesia menuju masyarakat

¹⁵ Grant, C.A. & Ladson-Billings, G. 1997. *Dictionary of Multicultural Education*. Arizona: The Oryx Press. 1997. <http://journal.um.ac.id/index.php/jip/article/view/2732/1268> (diakses 10-04 2018)

¹⁶ Buchori, M. *Pendidikan Pluralisme untuk Pendewasaan Kehidupan Berbangsa. Dalam Kisbiyah, Y., & Sabardila, A. Pendidikan Apresiasi Seni: Wacana dan Praktik untuk Toleransi Pluralisme Budaya.* (Desiderata: 2004) hlm 229

¹⁷Ma’arif, S..*Pendidikan Pluralisme di Indonesia.*(Yogyakarta: Logung Pustaka. 2005) <http://journal.um.ac.id/index.php/jip/article/view/2732/1268> (diakses 10-04 2018)

yang demokratis.¹⁸

6. Pendidikan Multikultural di Amerika Serikat

Salah satu sektor publik yang diberlakukan secara diskriminatif adalah pendidikan. Di awal-awal perkembangannya, pendidikan di Amerika selalu diwarnai dengan praktik diskriminatif. H.A.R. Tilaar dalam bukunya *Multikulturalisme: Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional* (2004) memaparkan secara singkat praktik diskriminatif pada wilayah pendidikan di Amerika yang dikenal dengan pendidikan yang bersifat segregasi sebagai bentuk awal pendidikan di Amerika sebelum munculnya pendidikan multikultural.¹⁹

Beberapa literatur tentang pendidikan multikultural di Amerika Serikat menjelaskan bahwa tujuan utama pendidikan multikultural adalah mencari kesetaraan hak dan sistem pendidikan yang efektif untuk peserta didik yang beragam dan untuk lebih demokratis dan berkeadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, menyarankan agar guru-guru melibatkan latar belakang budaya peserta didik dalam proses belajar mengajarnya, kemudian menyarankan guru untuk mengamati cara-cara belajar anak. Kedua pendapat ini bertujuan agar guru dapat memahami keunikan karakteristik siswa sehingga dia dapat membantu siswa meraih prestasinya dalam belajar.²⁰

Berbeda dengan dua pendapat di atas, Banks menyarankan agar guru dapat belajar budaya orang lain supaya dapat melihat budaya diri sendiri. Banks (menekankan pembelajaran di sekolah agar siswa menjadi warganegara yang memiliki sikap dan perilaku yang baik dalam hubungan antarmanusia (*human relation*)). Dia menyatakan “*we should educate students to be reflective, moral, caring, and active citizens in a troubled world*”. Berkaitan dengan pendapat ini, mengembangkan kurikulum transformasi yang menekankan siswa untuk memahami konsep, tema, isu, dan masalah-masalah budaya lain dalam pandangan budayanya. Tujuannya adalah agar siswa memiliki pengetahuan tentang budaya lain dan mengembangkan empati yang mengilhami komitmen mereka terhadap aktivitas pribadi, politik, sosial, dan kewarganegaraan.²¹

Tujuan yang provokatif tentang pendidikan multikultural datang dari Sleeter dan Grant. Mereka berpendapat bahwa pendidikan multikultural bertujuan untuk merekonstruksi masyarakat dan mencapai keadilan sosial dengan menentang segala bentuk penindasan. Tujuan ini dilatarbelakangi oleh situasi sosial dan politik yang berkaitan dengan isu gender, ras, dan disability yang dipandang sebagai kelompok tertindas dalam masyarakat. Sleeter dan Grant menyarankan guru untuk menyertakan isu sosial, politik, dan ekonomi dalam pembelajarannya sehingga siswa terlatih untuk menjadi advokat setelah mereka terjun ke masyarakat.

Menyimak dari pendapat di atas, pendidikan yang multikultural di Amerika Serikat berkaitan dengan sikap pendidik dan sekolah yang mengedepankan nilai-nilai

¹⁸ *ibid*

¹⁹H.A.R Tilaar, *Multikulturalisme Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia. 2004) hlm. 18

²⁰ Gollnick, D. M. & Chinn, P.C. *Multicultural Education in a Pluralistic Society*. (Columbus, Ohio: Pearson Merrill Prentice Hall, 2006) <http://journal.um.ac.id/index.php/jip/article/view/2732/1268> (diakses 10-04 2018)

²¹ Banks, J. A. *An Introduction to Multicultural Education*. (Needham Heights, MA: Allyn & Bacon, 2007) hlm. 5

kemanusiaan yang mendukung pembelajaran untuk siswa dari beragam latar belakang dengan segala keunikan dan perbedaannya. Pelaksanaannya terletak pada pendekatan-pendekatan pengajaran yang berdasarkan nilai-nilai demokrasi untuk mendidik siswa secara sama dan adil tanpa membedakan grup sosial atau kategori diversity seperti ras, etnik, gender, orientasi seksual, kelas sosial, berkelainan atau kekecualian, bahasa, agama, dan umur. Ras berhubungan dengan karakter seseorang secara fisik seperti warna kulit atau cara-cara berpenampilan. Etnik sering dipersamakan dengan ras karena di dalam kelompok etnik tertentu terdapat unsur ras atau sebaliknya. Namun demikian, etnik merupakan sekelompok orang-orang yang memiliki kesamaan sejarah nenek moyang, nilai-nilai, bahasa, dan adat istiadat.

Di Indonesia, istilah etnik identik dengan suku. Kelas sosial merupakan sebuah sistem yang membedakan struktur grup ditinjau dari sisi ekonomi, politik, budaya, dan sumber-sumber sosial lainnya. Gender berkaitan secara sosial dan psikologi dengan peran laki-laki dan perempuan yang dikukuhkan oleh kelompok masyarakat. Gender juga dibentuk secara budaya dan sosial yang menentukan karakteristik *femininity* dan *maskulinity*. Orientasi seksual merupakan sebuah identitas seksual seseorang, seperti hereroseksual, homoseksual (gay, lesbian), transgender, dan queer (keanehan). Bahasa adalah alat untuk berkomunikasi agar saling berhubungan satu dengan lainnya. Anak berkelainan atau kekecualian merupakan salah satu kategori grup sosial, baik anak berbakat atau kelainan khusus. Agama merupakan salah satu kategori *diversity* yang harus diketahui oleh guru karena agama akan mempengaruhi cara-cara seseorang berpikir dan bertindak. Umur sangat berkaitan dengan aspek psikologi perkembangan seorang anak.

Banks mengatakan bahwa setiap grup sosial membawa budayanya sendiri. Seseorang dapat dibentuk dan membentuk dirinya yang dipengaruhi oleh grup-grup sosial tersebut di atas menjadi sebuah identitas budaya individu (*individual cultural identity*) yang tercermin dalam cara bersikap, bertutur, dan berperilaku. Oleh karena itu, guru diharuskan untuk memiliki pemahaman tentang keberagaman dan keberbedaan siswa. Hal ini diperlukan karena praktik-praktik pendidikan multikultural di Amerika Serikat sangat berkaitan erat dengan sikap dan perilaku guru dalam mendidik siswanya dengan nilai-nilai demokrasi, yang meliputi “*freedom of inquiry, reason-ability, respectfulness, personal responsibility, and embrace of heterogeneity that transcend all differences*”. Sikap dan perilaku demikian sangat penting bagi guru-guru di Indonesia untuk mengubah cara-cara pembelajaran dari yang hierarkis dan otoriter menuju ke pembelajaran yang demokratis. Dengan sikap dan perilaku ini diharapkan para guru di Indonesia tidak membuat *stereotype* dan *prejudice* (prasangka) yang dapat mendorong perlakuan diskriminatif pada siswa.²²

Stereotype yaitu “*pictures in our heads of the people*”. Gambaran-gambaran dalam pikiran kita tentang orang tertentu tersebut dapat dikukuhkan oleh orang atau mungkin datang dari budaya tertentu yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Cara berpikir ini dapat berlanjut pada sebuah prasangka atau *prejudice*. Grant & L mengatakan bahwa “*Prejudice is a complex and multifaceted way of thinking and feeling about people that attributes particular characteristics to people and groups as more or*

²² Banks, J. A. *An Introduction to Multicultural Education*. (Needham Heights, tt, 2007) hlm. 5

less desirable than others”. Prasangka-prasangka terhadap orang, kelompok, dan budaya lain dapat berujung pada perilaku yang mendiskriminasi mereka. Implementasi pendidikan multikultural di sekolah bertujuan untuk menghindari pemikiran *stereotype*, *prejudice*, dan perilaku yang diskriminatif terhadap siswa yang berbeda dan beragama.²³

Simpulan

Dari beberapa uraian di atas penulis sedikit akan mencoba menggarisbawahi bahwa Konsep dan praktik pendidikan multikultural di Amerika Serikat dapat diaplikasikan di Indonesia untuk mendukung pendidikan yang lebih mengutamakan cara-cara yang demokratis.

Situasi dan praktik pendidikan multikultural di Amerika Serikat penting untuk dapat diaplikasikan di Indonesia agar para guru yang masih terikat dengan cara-cara hierarkis dan otoriter serta tidak menghargai keunikan siswa yang beragam dapat belajar untuk lebih demokratis. Namun demikian, pendidikan multikultural di Amerika Serikat sangat terkait dengan isu *diversity*, sehingga kemungkinan penerapannya di Indonesia menjadi sebuah tantangan. Kenyataan bahwa warisan rezim Suharto mengenai larangan mendiskusikan SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) masih berlanjut hingga kini. Namun demikian, pemahaman keberagaman dan keberbedaan siswa, dalam hubungannya dengan kelompok-kelompok lain sangat diperlukan dalam konteks pendidikan multikultural terutama untuk mengurangi *prejudice* dan diskriminasi.

Referensi

Daftar Pustaka

- Azra. Azyumardi, “*Identitas dan Krisis Budaya, Membangun Multikulturalisme Indonesia*”, <http://www.kongres.budpar.go.id/agenda/precongress/makalah/abstrak/58%20azyumardi%20azra.htm>.
- Baker G.C. 1994. *Planning dan Organizing for Multicultural Instruction*. (2nd). (California: Addison-Elsevy Publishing Company. 1994)
- Banks, J. A. *An Introduction to Multicultural Education*. (Needham Heights, MA: Allyn & Bacon, 2007)
- Banks, James A. *An Introduction to Multicultural Education*. (Boston: Allyn andBacon. 2001)
- Buchori, M. *Pendidikan Pluralisme untuk Pendewasaan Kehidupan Berbangsa. Dalam Kisbiyah, Y., & Sabardila, A. Pendidikan Apresiasi Seni: Wacana dan Praktik untuk Toleransi Pluralisme Budaya.* (Desiderata: 2004)
- Ernie Isis Aisyah Amini, *Analisis Kebutuhan Pendidikan Multikultural Berbasis Kompetensi pada Siswa SLTP di Kota Mataram*, (Mataram: Program Pascasarjana IKIP Negeri Singaraja, 2004).
- Gollnick, D. M. & Chinn, P.C. *Multicultural Education in a Pluralistic Society*. (Columbus, Ohio: Pearson Merrill Prentice Hall, 2006)

²³ Grant, C.A. & Ladson-Billings, G. *Dictionary of Multicultural Education*.....hlm. 6

- <http://journal.um.ac.id/index.php/jip/article/view/2732/1268> (diakse 10-04 2018)
- Grant, C.A. & Ladson- Billings, G. 1997. *Dictionary of Multicultural Education*. Arizona: The Oryx Press. 1997.
<http://journal.um.ac.id/index.php/jip/article/view/2732/1268>
- Hanum. Farida. *Fenomena Pendidikan Multikural pada Mahapeserta didik Aktavis UNY*. Laporan Penelitian. 2005 Lemlit UNY.
- inurrofiq Dawam, *Pendidikan Multikultural*, (Jogjakarta: Inspeal Ahimsa Karya Press, 2006),
- Kymlicka, W. & He, B. (Eds.). 2005. *Multiculturalism in Asia*. New York: Oxford University Press: 2005)
- Ma'arif, S..*Pendidikan Pluralisme di Indonesia*.(Yogyakarta: Logung Pustaka. 2005)
<http://journal.um.ac.id/index.php/jip/article/view/2732/1268> (diakse 10-04 2018)
- Maksum. Ali, *Pluralisme dan Multikulturalisme Paradigma Baru Pendidikan Agama Islam di Indonesia*, (Malang: Aditya Media Publishing, 2011),.
- MusaAsy"arie..“Pendidikan Multikutlural dan Konflik 1-2”. 2004.
www.kompas.co.id.
- Parekh. Bhikhu, *Rethinking Multikulturalism keberagaman Budaya dan Teori Politik*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008)
- Sulalah. *Pendidikan Multikultural dialektiaka Nilai-nilai Universitas Kebangsaan*. (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2011)
- Suparlan, 2003. “Bhinneka Tunggal Ika: Keanekaragaman Sukubangsa atau Kebudayaan?” *Antropologi Indonesia*, Tahun XXVII, No. 72, September-Desember 2003)
- Suparlan. Parsudi, “Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural”, *Makalah pada Simposium internasional Jurnal Antropologi Indonesia ke-3*. (Universitas Udayana Denpasar Bali, 2002
- Tholchah Hasan. Muhammad, *Pendidikan Multikultural Seabagai Opsi Penanggunggan Radikalisme*. (UNISMA: Malang 2016)
- Tilaar. H.A.R, *Multikulturalisme Tan- tangan Global Masa Depan dalam Transformas Pendidikan Nasional*, (Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia. 2004)
- Tilaar. H.A.R. *Kekuatan dan Pendidikan*. (Jakarta: Grasindo. 2004)
- Zakiyuddin. Baidhawy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural* (Jogjakarta: Rihlah Group, 2012
- Zakiyudin Baidhawji, *Pendidikan Islam Multikulturalisme*, (Jakarta: PT Erlangga,2005)